



IMPLEMENTASI COUNTER-TRAFFICKING INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2007-2013

Adiningrum Puspahapsari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

In human trafficking, Indonesia as a country not only act as a source, but also a transit and a destination. The number of human trafficking cases have been increasing since Indian Ocean tsunami occurred. According to Trafficking in Persons (TIP), Indonesia's position is at Tier 2, meaning that Indonesia government has not met the minimum standards of Trafficking Victims Protection Act (TVPA), but still showing some efforts to meet the standards. To combat human trafficking, Indonesia has cooperated with IOM through one of its law enforcement body, Indonesian National Police (INP). This research aims to analyze the cause of the increasing number of human trafficking cases although several IOM's counter-trafficking efforts have been placed throughout 2007-2013 period. This research employs theory of international cooperation and international organization with neoliberalism paradigm to analyze the data collected through literature studies, documentation, and interview as well. The result shows that the ineffective implementation of IOM's counter-trafficking efforts was not necessarily caused by the absence of mutual interests, but by the inavailability of quick feedback to deal with the constraints occurring during the cooperation..

Keywords: *human trafficking, counter-trafficking, IOM-Indonesia, IOM-Polri*

1. Pendahuluan

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional¹ karena dilakukan dengan melibatkan jaringan kejahatan lintas batas negara.

¹UNTOC menyebutkan bahwa kejahatan transnasional terorganisir adalah kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas tiga orang atau lebih, dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius sebagaimana yang dimaksud di dalam Konvensi dalam rangka memperoleh, secara langsung maupun tak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya

Di Indonesia, perdagangan manusia mengalami peningkatan setelah terjadinya tsunami yang terjadi di bagian ujung pulau Sumatera, dibandingkan pada tahun 2004, angka perdagangan manusia meningkat pada tahun 2005, dan selanjutnya terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2006. Angka perdagangan manusia² yang meningkat pesat terlihat pada tahun 2006, dimana hal tersebut disebabkan karena tindak *trafficking* dilakukan mengambil waktu beberapa minggu atau bulan setelah bencana tsunami terjadi di bagian ujung pulau Sumatera (Jane A. Morse, 2005).

Dalam sistem laporan *Trafficking in Persons* (TIP), Indonesia berada pada posisi Tier 2. Negara yang berada pada Tier 2 dalam sistem ini merupakan negara yang pemerintahannya belum memenuhi standar minimum Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia atau *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) tahun 2000, tetapi masih menunjukkan usaha dan peningkatan untuk memenuhi standar tersebut (U.S. Department of State, 2011).

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan dan peraturan dalam penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia, kerjasama telah dilakukan oleh Indonesia. Selain penanggulangan dan kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian, instansi dan lembaga lokal, kerjasama lainnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah kerjasama dengan organisasi internasional, salah satunya adalah kerjasama dengan *International Organization for Migration* atau disingkat IOM³. Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui hubungan antara pemerintah dengan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* yaitu dengan membentuk *Counter Trafficking Unit* (CTU) oleh IOM (www.iom.or.id).

Dalam upaya memerangi perdagangan manusia (*counter-trafficking*), IOM memiliki beberapa kegiatan untuk pencegahan *trafficking*, yaitu *Awareness raising/Mass information*, *Capacity building and training*, *Research/Data Collection*, dan *Law enforcement training* (IOM Counter-trafficking Activities). Sejak tahun 2003, IOM Indonesia telah memberi kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan. IOM Indonesia mendukung upaya Indonesia untuk menerapkan perundang-undangan anti perdagangan manusia yang diberlakukan pada 2007, dengan berfokus menuntut para pelaku dan melindungi para korban (IOM Annual Report, 2009: 81). Kontribusi dan dukungan dari IOM Indonesia tersebut merupakan bentuk salah satu kegiatan *counter-trafficking* IOM yaitu Pelatihan dan pengembangan kapasitas (*Capacity building and training*).

²Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penekanan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi

³IOM merupakan organisasi internasional independen yang berdiri pada tahun 1951 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. IOM berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama. IOM bergerak dalam menangani migrasi di empat bidang umum, yaitu:

- (a) Migrasi dan pembangunan
- (b) Memfasilitasi migrasi
- (c) Mengatur migrasi
- (d) Migrasi yang dipaksakan

Upaya pengembangan kapasitas IOM Indonesia berfokus pada penyediaan bantuan kepada korban perdagangan manusia dan pada saat yang bersamaan juga berusaha untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga utama di pemerintahan Indonesia untuk mengimplementasikan bantuan korban yang efektif dan relevan serta kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan (IOM Counter-Trafficking Activities: 4). Meskipun pendekatan intervensi yang IOM lakukan tampak cukup komprehensif, namun ternyata tingkat kasus perdagangan manusia tidak kunjung menurun. Angka kasus perdagangan manusia di Indonesia terus meningkat hingga tahun 2013. Jumlah kasus yang tercatat yang paling tinggi adalah pada tahun 2013, yaitu berjumlah 614, meningkat sebanyak 200 lebih dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 403, dan pada tahun 2011 berjumlah 289.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai “Mengapa angka perdagangan manusia pada implementasi strategi dan praktek pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas sebagai salah satu bentuk kegiatan *counter-trafficking* IOM tidak kunjung menurun di Indonesia?” merupakan hal yang penting karena dapat diketahui penyebab belum berhasilnya implementasi *counter-trafficking* IOM di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan organisasi internasional menurut paradigma neo-liberal.

Menurut teori kerjasama internasional yang diungkapkan oleh Keohane dan Nye (2001: 4) kerjasama antara negara dengan non-negara, dalam hal ini institusi atau organisasi internasional, mulai bermunculan karena baik negara maupun organisasi sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama, dan dengan adanya institusi atau organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama. Keberhasilan kerjasama menurut Keohane dan Axelrod (1985: 227) menyangkut masalah mutualitas kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*). Standar keberhasilan kerjasama yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar mutualitas kepentingan dan faktor umpan balik atau *feedback* yang memadai dari standar bayangan masa depan. Uraian di atas memunculkan gagasan bahwa implementasi strategi dan praktek pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas sebagai bentuk kegiatan *counter-trafficking* IOM dalam penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia dikatakan belum berhasil dan mengalami kendala, karena disebabkan tidak adanya mutualitas kepentingan di antara para aktor (IOM dan Polri) dan juga tidak adanya umpan balik atau *feedback* yang memadai dalam menghadapi perubahan sikap atau tindakan aktor lain atau perubahan situasi.

2. Pembahasan

Dalam memerangi perdagangan manusia, IOM dan Polri telah melakukan kerjasama yang dibagi dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan operasional. Dalam bidang pembinaan kerjasama IOM dengan Polri meliputi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan sistem dan metode. Sedangkan dalam bidang operasional kerjasama Polri dan IOM meliputi kegiatan *preemptive*, *preventive*, dan penegakan hukum (Darmastuti, 2015: 61-76).

2.1 Mutualitas Kepentingan dalam Kerjasama Bidang Pembinaan

Kerjasama antara IOM dengan Polri dalam bidang pembinaan dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya diberikan kepada anggota Polri melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dalam bentuk seminar, *workshop*, *Forum Group Discussion* (FGD) yang biasanya dilakukan selama satu atau dua hari. Tujuan dari pemberian pendidikan dan pelatihan ini agar para petugas Polri dapat menangani kasus perdagangan manusia sesuai prosedur yang berlaku. Sepanjang periode 2007 hingga 2013,

IOM telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Polri, dimana pendidikan atau pelatihan yang diberikan oleh IOM tersebut merupakan pendidikan atau pelatihan yang berfokus pada peningkatan SDM Polri dalam bidang HAM atau dalam bidang pemberian layanan dan bantuan kepada korban perdagangan manusia.

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung kegiatan penanganan perdagangan manusia dengan cara memperbaharui dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana utama maupun khusus. Sepanjang periode 2007 hingga 2013, kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan dari para korban perdagangan manusia, dimana IOM bekerjasama dengan Polri untuk membangun pusat rehabilitasi dan penampungan untuk para korban. Salah satunya diwujudkan dengan didirikannya *Counter-Trafficking Unit* (CTU) oleh Indonesia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai tempat atau ruang khusus bagi korban perdagangan manusia untuk menerima bantuan medis dan psikis (IOM Annual Report, 2009: 60). Kemudian kegiatan peningkatan sistem dan metode dilaksanakan dengan melakukan penyusunan pedoman hubungan tata cara kerja dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi anggota di lapangan dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia. Selain kegiatan penyusunan pedoman hubungan tata cara kerja, kerjasama IOM dan Polri dalam peningkatan sistem dan metode sepanjang tahun 2007-2013 diwujudkan dengan diberikannya buku-buku panduan dan pedoman penanggulangan perdagangan manusia bagi anggota di lapangan oleh IOM. Buku-buku panduan dan pedoman tersebut berlandaskan kebijakan yang dimiliki oleh badan IOM (IOM Indonesia, 2014: 2).

Jika dilihat dari kerjasama bidang pembinaan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh IOM dan Polri memberikan keuntungan untuk pihak IOM. Dari kerjasama tersebut IOM dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan HAM, pembangunan dan perbaikan fasilitas untuk para korban, dan juga pedoman yang berdasarkan kebijakan organisasinya yang berdasarkan pada kemanusiaan dan HAM. Hal tersebut menunjukkan bahwa IOM dapat melaksanakan fokusnya dalam bidang kemanusiaan. Selain itu Polri sendiri juga memperoleh pengetahuan dan informasi untuk melakukan penanganan terhadap tindak perdagangan manusia dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan kata lain, baik pihak IOM maupun pihak Polri sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan dari kerjasama bidang pembinaan ini, masing-masing pihak pun tidak melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dalam kerjasama ini.

2.2 Mutualitas Kepentingan dalam Kerjasama Bidang Operasional

Dalam bidang operasional, kerjasama dalam kegiatan *preemptive* dilakukan dengan meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum. Melalui sosialisasi tersebut, Polri dan IOM secara langsung memberikan informasi dan pengetahuan tentang kejahatan perdagangan manusia untuk masyarakat umum. Dengan bertambahnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, tentu dapat berpengaruh terhadap angka korban perdagangan manusia di Indonesia. Sedangkan untuk penyuluhan hukum, kegiatan tersebut diberikan kepada para praktisi hukum di Indonesia (polisi, jaksa, dan hakim). Penyuluhan hukum diberikan karena melihat dari fakta yang ada bahwa tingkat penghukuman pelaku perdagangan manusia yang masih rendah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia. Sepanjang periode 2007-2013 IOM dan Polri telah melakukan sosialisasi, baik untuk anggota Polri itu sendiri maupun untuk masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sebagian memiliki materi yang difokuskan pada tema mengenai HAM.

Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam bidang operasional adalah kegiatan *preventive* yang meliputi kegiatan pengamanan, penjagaan, patroli, serta pengawalan.

Kegiatan *preventive* ini mayoritas dilakukan oleh jajaran Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri. Bantuan IOM dalam kegiatan *preventive* ini diwujudkan hanya melalui pengawalan pada saat memberikan bantuan penjemputan dan mereintegrasi para korban kedaerah asal. Daerah perbatasan dan perairan Indonesia merupakan daerah yang menjadi gerbang masuk dan keluar bagi pelaku dan korban perdagangan manusia. Hal tersebut juga disebabkan oleh posisi Indonesia yang menjadi negara transit bagi praktek perdagangan manusia sehingga pengamanan dan penjagaan perlu untuk dilakukan. Kegiatan pengamanan dan penjagaan merupakan tugas dari Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Umumnya kegiatan pengamanan dan penjagaan ini dilakukan di daerah-daerah perbatasan atau perairan Indonesia dalam bentuk patroli (Darmastuti, 2015: 75). Sepanjang periode 2007 hingga 2013, kegiatan patroli telah dilakukan oleh Polri baik di wilayah perairan maupun darat.

Untuk kegiatan pengawalan, IOM memberikan bantuan dengan me-reintegrasi para korban ke daerah asal. Pada tahap reintegrasi, sebelumnya IOM telah memberikan bekal keterampilan dan kewirausahaan sebagai bekal hidup berupa bantuan pendidikan, keterampilan kerja, perawatan medis dan psikologis lanjutan, penampungan dan usaha kecil bagi korban perdagangan manusia. Sepanjang periode 2007 hingga 2013 IOM telah memberikan beberapa bantuan kepada para korban perdagangan manusia. Dalam bidang *preventive* juga dilakukan kegiatan penegakan hukum yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sepenuhnya dilakukan oleh Baharkam Polri. Dalam hal ini, IOM membantu proses penyelidikan Polri dengan memberikan penampungan dan pengobatan bagi korban perdagangan manusia sehingga Polri dapat mendapatkan Informasi atau keterangan dari para korban. Sepanjang periode 2007 hingga 2013, Polri melakukan kegiatan-kegiatan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus perdagangan manusia.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa respon yang diberikan oleh IOM dan Polri dalam penanganan perdagangan manusia ternyata masing-masing berbeda, terutama pada bidang *preventive*. IOM cenderung lebih memberi respon apabila ada korban yang membutuhkan bantuan dalam suatu kasus kejahatan perdagangan manusia dan bertindak dengan memberikan bantuan kepada korban dari tindak kejahatan tersebut, sedangkan Polri lebih memberi respon terhadap adanya laporan kasus perdagangan manusia dan bertindak dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan pelaku. Respon yang berbeda tersebut disebabkan karena adanya kepentingan tersendiri yang dimiliki masing-masing pihak. IOM memiliki kepentingan untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi, dimana pengelolaan migrasi dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia. Sedangkan Polri memiliki fokus yang cenderung mengutamakan bidang keamanan, karena adanya Peraturan Presiden no. 5 Tahun 2010 yang mengharuskan delapan lembaga pemerintahan termasuk Polri, untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga tersebut dalam bidang pertahanan dan keamanan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012: 1).

Namun meskipun respon yang diberikan masing-masing berbeda, IOM dan Polri sama-sama memperoleh keuntungan dari kerjasama mereka. IOM dapat memenuhi kepentingannya demi mencapai ketertiban migrasi dan mempromosikan rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan memberikan bantuan-bantuan kepada para migran, termasuk korban perdagangan dan penyelundupan manusia. Sedangkan Polri memperoleh keuntungan yaitu Polri dapat melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 demi mencapai kepentingan Indonesia yaitu untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia dengan meningkatkan sistem pertahanan dan pengamanan agar dapat memperoleh kepercayaan dari negara-negara lain, dan juga Indonesia dapat melakukan kerjasama dan mempertahankan hubungannya dengan negara-negara lain. Selain itu,

meskipun respon yang diberikan masing-masing pihak berbeda, pemberian akomodasi dapat diatur dengan cukup baik.

2.3 Ketiadaan Umpan Balik yang Memadai dalam Mengatasi Kendala dalam Kerjasama antara IOM dengan Polri

Belum berhasilnya implementasi *counter-trafficking* IOM disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang terjadi dalam praktek pelaksanaan kerjasama antara IOM dan Polri. Kendala-kendala tersebut terjadi karena IOM dan Polri belum memberikan umpan balik atau *feedback* yang memadai dalam menghadapi kendala tersebut.

Kendala yang pertama adalah masih kurangnya sistem koordinasi antara IOM dengan Polri yang terlihat dari adanya perbedaan dalam pendataan kasus. Jumlah kasus yang didata oleh Polri dan didata oleh IOM sepanjang tahun 2007-2013 menunjukkan angka yang jauh berbeda (Darmastuti, 2015: 92). Polri seharusnya dapat memberi umpan balik dengan bertindak tegas untuk meminta hasil temuan terkait pendataan kasus perdagangan manusia kepada pihak IOM, sehingga kedua pihak dapat melakukan koordinasi untuk mempersiapkan strategi yang lebih baik dalam melakukan kegiatan penanganan perdagangan manusia berikutnya.

Kendala kedua muncul dari dalam badan Polri yang sering melakukan mutasi (www.cnnindonesia.com), dan kendala yang ketiga adalah terbatasnya waktu pemberian sosialisasi dan pelatihan oleh IOM kepada Polri (Darmastuti, 2015: 92). Keadaan tersebut seharusnya dapat diantisipasi oleh IOM, dimana IOM yang sudah mengetahui sikap pihak Polri yang sering melakukan mutasi tersebut seharusnya dapat memberi umpan balik, yaitu dengan memperpanjang pemberian waktu pelatihan dan sosialisasi, dan dilakukan secara rutin.

Kendala yang keempat adalah tidak adanya payung hukum di negara tempat para korban perdagangan manusia dikirimkan. Polri dan IOM tidak terlihat memberikan umpan balik terhadap permasalahan ketiadaan payung hukum tersebut. Selain itu situasi dimana para *user* para korban (TKI ilegal) merupakan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan merupakan orang yang penting juga menyebabkan Polri dan IOM tidak dapat memberikan umpan balik karena adanya keterlibatan pejabat dan pihak penting dalam sindikat perdagangan manusia yang dapat menutup-nutupi dan memanipulasi kasus-kasus yang mereka dalangi.

3. Kesimpulan

Dalam kerjasama yang telah dilakukan oleh IOM dan Polri, meskipun respon dan fokus kedua pihak berbeda, namun kedua pihak sama-sama saling memberi keuntungan satu sama lain, dan juga tidak terlihat adanya kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih serta pengaturan akomodasi dilakukan dengan cukup baik. Kedua pihak terlihat sama-sama berusaha untuk mewujudkan tujuan mereka, yaitu untuk mengembangkan kapasitas Kepolisian Indonesia agar dapat melakukan penanganan terhadap isu HAM, yang di dalamnya menyangkut isu perdagangan manusia, secara lebih baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama antara IOM dan Indonesia terdapat adanya mutualitas kepentingan. Penyebab dari belum berhasilnya kerjasama IOM dan Polri sebagai bentuk implementasi *counter-trafficking* IOM bukanlah disebabkan oleh ketiadaan mutualitas kepentingan di antara kedua pihak, namun disebabkan oleh hal lain. Penyebab lain tersebut adalah adanya kendala-kendala yang terjadi karena IOM dan Polri belum memberikan umpan balik atau *feedback* yang memadai dalam menghadapi kendala tersebut. Karena ketiadaan umpan balik yang memadai tersebut, maka kerjasama tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga angka kasus perdagangan manusia tetap naik tiap

tahunnya walaupun kerjasama sebagai bentuk *counter-trafficking* IOM tersebut sudah dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Checkel, Jeffrey. (1999). "Norms, Institutions and National Identity in Contemporary Europe" dalam *International Studies Quarterly*, Vol 43 No 1, hal 83-114.
- Divhubinter Polri. (2011). *Laporan Workshop Perbatasan 25 Mei 2011 di Bogor. Laporan*. Divhubinter Polri.
- Düvell, Franck. (2006). *Questioning Conventional Migration Concepts: The Case of Transit Migration. Paper*. Dipresentasikan pada Workshop Gaps and Blindspots of Migration Research, Central European University, Budapest.
- Newsletter IOM Indonesia Januari 2014. *Combating People Smuggling in 2013*.
- Newsletter IOM Indonesia Oktober 2014. *Penguatan Kapasitas bagi Penegak Hukum di Indonesia*.
- Rosyidin, Mohamad. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sikkink, Kathryn dan Martha Finnemore. (1998). "International Organization" dalam *International Norm Dynamics and Political Change* (hal 888-917). Cambridge University.